



PERUBAHAN - TUNJANGAN PERUMAHAN – DPRD
2025

PERBUP KEBUMEN NO. 51, BD 2025/NO. 52, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak memperoleh tunjangan perumahan sesuai dengan prinsip keadilan sosial; bahwa untuk menjamin ketepatan, kewajaran, dan akuntabilitas, diperlukan adanya kajian yang komprehensif sehingga pemberian tunjangan tersebut dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai asas keadilan; bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2025 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Kebumen No. 15 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kebumen No. 5 Tahun 2024; dan Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 4 mengenai besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan per orang, yaitu: Ketua DPRD sebesar Rp29.510.000,00; Wakil Ketua DPRD sebesar Rp24.351.000,00; dan Anggota DPRD sebesar Rp19.998.000,00. Pemberian Tunjangan Perumahan tersebut dibayarkan terhitung mulai bulan Oktober 2025.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 September 2025.
- Lampiran: -